

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini fenomena ketimpangan sosial masih sangat kental terjadi di Indonesia. Distingsi tersebut terlihat akan jauhnya kualitas kehidupan antara kaum konglomerat dengan kaum prasejahtera. Ironisnya, banyak kaum prasejahtera ini tidak memiliki kapasitas dan kesulitan untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Oleh karena itu, pemerintah hingga saat ini terus berusaha untuk menekan melimpahnya angka masyarakat prasejahtera di Indonesia dan berkolaborasi dengan para *stakeholders*.

Salah satu usaha untuk mengurangi banyaknya masyarakat yang masih prasejahtera di Indonesia adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Harapan dilakukannya pemberdayaan masyarakat ialah agar dapat tercapainya pembangunan nasional yang baik, sebab maksud dari dilakukannya pemberdayaan dalam rangka pembangunan suatu negara ialah agar dapat mengembangkan perekonomian masyarakat melalui mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.¹ Hal tersebutlah yang kini tengah dijalankan oleh pemerintah untuk mengurangi melimpahnya jumlah angka masyarakat prasejahtera yang ada di Indonesia. Salah satu solusi untuk menekan tingginya angka masyarakat prasejahtera di Indonesia ialah dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat melalui UMKM, yakni usaha yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan para pelaku usaha.

Namun dalam Upaya menekan angka masyarakat prasejahtera dengan melakukan pemberdayaan yang melibatkan pelaku UMKM, kenyataannya para UMKM ini juga mempunyai berbagai macam kendala dan problematika yang dialami. Kendala-kendala yang dirasakan oleh pelaku UMKM biasanya berupa dalam hal aspek

¹ Margayaningsih, Dwi Iriani. "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa". *Publiciana*. 11(1). Hal 73. 2018

modal yang dimiliki, kemampuan untuk mengendalikan dan menjalankan usaha yang dimiliki, dan kualitas dari sumber Daya Manusia dalam hal pengelolaannya. Selain itu, kendala dan permasalahan yang dialami oleh para pelaku UMKM lainnya ialah mereka mengalami kepelikan pada hal mengakses informasi dan teknologi pada zaman yang telah serba *modern* seperti sekarang ini. Hal-hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan terbatasnya kemampuan para pelaku UMKM ini untuk mengembangkan usaha yang dimiliki.

Tak hanya persoalan mengenai kendala-kendala yang dialami oleh pelaku UMKM, di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang penduduknya banyak dan minat masyarakatnya rendah dalam hal menciptakan suatu inovasi dan kreatifitas dari potensi yang mereka miliki tentunya juga menjadi faktor penghambat dalam hal pembangunan ekonomi. Meski begitu, orang-orang tersebut, khususnya para pelaku UMKM ini memerlukan modal guna memulai atau meningkatkan usaha yang mereka miliki. Namun kenyataannya mereka kesulitan untuk melakukan hal tersebut karena mereka kesulitan dalam hal mengakses keuangan untuk mendapatkan modal usaha. Oleh sebab itu, bank ataupun lembaga keuangan syariah non bank memiliki peranan yang sangat vital dalam hal memberikan pembiayaan mikro agar para nasabah atau masyarakat yang belum memenuhi persyaratan untuk mengakses bank-bank pada umumnya, khususnya nasabah-nasabah yang memiliki penghasilan yang kecil dan dikatakan masyarakat prasejahtera dapat mendapatkan kesempatan yang sama.

Salah satu lembaga keuangan yang saat ini membantu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah. Bank ini memiliki fokus melayani segmen usaha rakyat. Hal yang melatarbelakangi bank tersebut untuk memberikan pembiayaan mikro tersebut ialah untuk memberdayakan jutaan keluarga pra/cukup sejahtera dengan harapan agar

keluarga berpendapatan rendah tersebut khususnya masyarakat prasejahtera dapat meningkatkan penghasilan dan tingkat kesejahteraan kehidupan mereka.²

Permasalahan mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat belakangan ini juga turut menarik perhatian masyarakat berkaitan bertambahnya pemahaman masyarakat untuk turut serta dalam membantu pembangunan yang beriringan dengan gairah keterbukaan dan pelaksanaan otonomi menempatkan para pemangku kepentingan pembangunan, yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta. Kondisi ini juga didukung dengan semakin terbukanya peluang bagi masyarakat sebagai relawan untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan berbasis komunitas melalui skema aksi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam hal proses pembangunan seperti turut serta dalam aksi pemberdayaan, maka bangsa dan negara negara tersebut akan lebih kuat dalam hal menghadapi perubahan-perubahan yang ada di lingkup nasional bahkan internasional.³

Dengan alasan tersebutlah peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena mengenai problematika yang dialami oleh masyarakat prasejahtera di Indonesia, serta peran mahasiswa sebagai agen perubahan di masyarakat dalam melihat kondisi tersebut. Dalam kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa ini ditujukan untuk membantu mengembangkan usaha-usaha nasabah Bank BTPN Syariah yang merupakan masyarakat prasejahtera dengan proyek-proyek yang ditugaskan. Bank BTPN Syariah mempercayakan tugas kepada mahasiswa sebagai fasilitator pendamping untuk dapat membuat usaha nasabah lebih berkembang melalui program pendampingan Daya. Melalui program Daya ini, diharapkan peran mahasiswa sebagai Fasilitator Pendamping dapat memberikan edukasi dan solusi terkait dengan kendala-kendala yang dialami oleh para nasabah melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan.

² BTPN. "Bisnis Syariah". <http://www.btpn.com/segmen-usaha/bisnis-syariah/>. Diakses pada 22 Desember 2022

³ Zubaedi. Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik. Jakarta: Kencana. Hal 1. 2013.

Selain itu, sebagai alasan metodologis mengapa peneliti tertarik untuk membahas mengenai Bank BTPN Syariah ialah karena Bank BTPN Syariah memiliki ciri khas tersendiri apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya dalam hal melayani nasabahnya. Berbagai lembaga keuangan lainnya yang berupa bank maupun non bank, biasanya dalam menjalankan usahanya ialah dengan memberikan pelayanan keuangan kepada para nasabahnya, hal tersebut tentunya juga diterapkan oleh Bank BTPN Syariah, akan tetapi terdapat perbedaan tersendiri apabila dibandingkan dengan bank-bank lainnya, yang diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Bank BTPN Syariah merupakan bank yang target bisnisnya kepada masyarakat prasejahtera, di mana kebanyakan bank-bank pada umumnya justru sebisa mungkin untuk target bisnisnya pada kalangan Masyarakat sejahtera.
2. BTPN Syariah merupakan bank syariah yang memberikan pemberdayaan usaha kepada perempuan yang memiliki dan menjalankan usaha kecil.
3. Mayoritas karyawan dari Bank BTPN Syariah adalah perempuan.
4. Banyak karyawan dari Bank BTPN Syariah yang merupakan berlatar belakang Pendidikan SMA, di mana bank-bank pada umumnya justru menerapkan kualifikasi pendidikan yang cukup tinggi untuk menjadi karyawannya.
5. Bank BTPN Syariah mampu membuktikan dirinya sebagai bank yang mampu mencetak generasi bankir baru dalam melayani masyarakat prasejahtera produktif.

Dari segi isu yang dibahas, skripsi ini berfokus pada kajian mengenai konsep pengembangan dan pemberdayaan masyarakat para pelaku UMKM yang diinisiasi oleh Program Daya yang merupakan salah satu program pemberdayaan UMKM dari Bank BTPN Syariah. Disusul dengan pembahasan kebijakan pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat yakni mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana implementasinya, dan apa yang telah dilakukan (*what is actually done*).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran BTPN Syariah dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Prasejahtera?
2. Bagaimana Bentuk Kegiatan Pemberdayaan Dalam Program Daya BTPN Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BTPN Syariah sebagai lembaga keuangan dalam meningkatkan taraf hidup Masyarakat prasejahtera.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk kegiatan Program Pemberdayaan masyarakat dalam Program Daya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat diantaranya untuk:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini semoga dapat menjadi sahabat komunikasi yang efektif untuk para pembaca juga menambah referensi dalam mengetahui diskursus pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan perspektif yang lebih beragam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan nantinya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang Peran BTPN Syariah Sebagai Bank Umum Syariah dalam hal memberdayakan masyarakat prasejahtera.

2. Bagi masyarakat luas penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan wawasan untuk mengetahui program Daya sebagai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Peneliti menggunakan tinjauan Penelitian sejenis sebagai bahan untuk dasar penelitian yang dilakukan. Tinjauan Penelitian sejenis digunakan sebagai bahan perbandingan antara penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang baru akan dilakukan. Pada penelitian ini, diperlukan sebuah tinjauan penelitian sejenis dari beberapa penelitian sebelumnya. Pembuatan tinjauan penelitian sejenis dapat membantu penulis serta pembaca untuk mengetahui topik dan pembahasan yang akan diteliti pada sebuah penelitian. Beberapa kajian literatur yang ada setidaknya dapat dijadikan bahan referensi ataupun dijadikan sebagai panduan dalam menganalisis permasalahan yang ada, pada bagian ini akan dikemukakan tentang beberapa tinjauan penelitian sejenis. Adapun beberapa tinjauan penelitian sejenis yang dijadikan acuan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi dari Sukma Napis Ali yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prasejahtera Melalui Bimbingan *Marketing Online* oleh Yayasan Insan Mulia Sejahtera di Pasar Minggu Jakarta Selatan” pada tahun 2021. Penelitian tersebut membahas tentang peran Yayasan Insan Mulia dalam meningkatkan ekonomi masyarakat prasejahtera melalui bimbingan *marketing online* yang diberikan. Dari proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Insan Mulia Sejahtera melalui bimbingan *Marketing Online* telah memberikan masyarakat prasejarah keterampilan untuk bekal dalam dunia kerja dan memberi peluang kerja dengan penghasilan yang layak dari pada sebelumnya. Selain itu, bimbingan *Marketing Online* yang dilakukan oleh Yayasan Insan Mulia juga telah sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Namun, proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Insan

Mulia Sejahtera dinilai masih ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan proses pemberdayaan yang berupa masih kurangnya variasi kegiatan pelatihan pemberdayaan yang dilakukan Yayasan Insan Mulia Sejahtera. Hal tersebut membuat para peserta pelatihan kerap kali merasa bosan. Oleh karena itu, tentunya harus adanya variasi kegiatan ini agar para peserta pelatihan tidak merasa bosan selama proses pelatihan.

2. Kemudian, penulis menggunakan buku yang berjudul “Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)” yang disusun oleh Faroman Syarief. Dalam tulisannya tersebut, Faroman Syarief membahas mengenai manajemen kewirausahaan dari usaha kecil hingga menengah. Selain itu, pada bukunya tersebut Faroman Syarief juga menjelaskan mengenai ruang lingkup UMKM dan pemberdayaan kepada UMKM. Karya dari Faroman Syarief tersebut memiliki persamaan dengan tulisan yang ditulis oleh penulis, yakni sama-sama membahas tentang ruang lingkup UMKM dan pemberdayaan UMKM. Hal yang membedakan dengan tulisan penulis adalah pada tulisan penulis pemberdayaan yang dilakukan diinisiasi oleh suatu lembaga keuangan, sementara pada tulisan Faroman Syarief pemberdayaan yang dilakukan lebih berfokus pada teori pemberdayaan UMKM.
3. Selanjutnya, penulis menggunakan tulisan karya dari Dr. Ir. Sunarti, MS yang berjudul “Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya”. Karya dari Dr. Ir. Sunarti, MS tersebut membahas tentang indikator-indikator apa saja yang termasuk dalam klasifikasi masyarakat miskin/prasejahtera. Tak hanya membahas tentang indikator-indikator yang termasuk dalam klasifikasi masyarakat miskin/sejahtera, namun tulisannya tersebut juga mencakup hal-hal seperti tujuan pembangunan, konsep ruang lingkup kesejahteraan, indikator keluarga sejahtera, dan pengukuran keluarga sejahtera. Karya dari Dr. Ir. Sunarti, MS memiliki persamaan dengan tulisan yang ditulis oleh penulis, yakni sama-sama membahas tentang pengukuran keluarga sejahtera dan mekanisme mengembangkan keluarga prasejahtera.

Namun, hal yang membedakan tulisan dari penulis dengan karya dari Dr. Ir. Sunarti, MS adalah pada tulisan dari penulis keluarga sejahtera yang dimaksud mencakup para pelaku UMKM, sementara pada karya dari Dr. Ir. Sunarti, MS, tidak membahas mengenai para pelaku UMKM dan keluarga prasejahtera yang dimaksud mencakup status yang lebih luas.

4. Kemudian penulis menggunakan tulisan karya dari Dr. Zubaedi, M.Ag, M.Pd yang berjudul “Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik”. Dalam bukunya tersebut, Dr. Zubaedi, M.Ag, M.Pd membahas tentang pengembangan masyarakat, model-model pengembangan masyarakat, peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan diskursus pengembangan masyarakat, keterlibatan organisasi keagamaan dalam model pengembangan masyarakat, dan peran dan keterlibatan dari beberapa organisasi lainnya dalam pengembangan masyarakat. Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Zubaedi, M.Ag, M.Pd tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian dan tulisan penulis, yakni mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan suatu organisasi yang terlibat dalam kegiatan tersebut, hanya saja jenis organisasinya saja yang berbeda, apabila pada tulisan dari Dr. Zubaedi, M.Ag, M.Pd organisasi yang terlibat ialah beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pada tulisan yang ditulis oleh penulis organisasi yang terlibat pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah suatu lembaga keuangan. Selain itu, hal yang membedakan lainnya pada tulisan penulis dengan karya dari Dr. Zubaedi, M.Ag, M.Pd adalah pada tulisan yang ditulis oleh penulis membahas tentang kemiskinan dan keluarga prasejahtera, sementara pada tulisan yang ditulis oleh Dr. Zubaedi, M.Ag, M.Pd tidak dibahas, melainkan pada tulisannya tersebut lebih berfokus pada model-model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
5. Kemudian penulis menggunakan jurnal karya dari Ambar Teguh Sulistiyani dan Yulia Wulandari yang berjudul “Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sitimulyo, Kecamatan, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri”. Dalam tulisannya tersebut, penulis membahas mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh suatu perguruan tinggi di Indonesia, mulai dari proses kegiatan motivasi, penyuluhan, edukasi, konsultasi, serta advokasi. Tulisan dari Ambar Teguh Sulistiyani dan Yulia Wulandari memiliki kesamaan dengan tulisan yang ditulis oleh penulis, yakni dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan memperlibatkan ranah perguruan tinggi. Namun, hal yang membedakan tulisan Ambar Teguh Sulistiyani dan Yulia Wulandari dengan tulisan penulis ialah tulisan dari Ambar Teguh Sulistiyani dan Yulia Wulandari pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan berupa penanggulangan mengenai tingginya volume sampah di Desa Sitimulyo, sedangkan pada tulisan penulis pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan ialah menasar pada Upaya untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM.

6. Kemudian penulis menggunakan tulisan karya dari Aprilia Theresia yang berjudul “Pembangunan Berbasis masyarakat : Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat”. Dalam bukunya tersebut, penulis membahas mengenai strategi-strategi dan metode-metode dalam mengembangkan dan memberdayakan Masyarakat. Pada tulisannya tersebut juga penulis membahas mengenai Pembangunan yang dilakukan oleh para *stakeholder* melalui Masyarakat. Pada buku yang ditulis oleh Aprilia Theresia tersebut terdapat kesamaan dengan tulisan yang ditulis oleh penulis, yakni sama-sama membahas tentang pengembangan masyarakat. Hal yang membedakan tulisan dari Aprilia Theresia dengan tulisan penulis adalah subjek pengembangan dan pemberdayaannya. Pada tulisan yang ditulis oleh Aprilia Theresia masyarakat yang diberdayakan adalah masyarakat prasejahtera dengan berbagai jenis status pekerjaannya, sementara pada tulisan yang ditulis oleh penulis Masyarakat prasejahtera yang diberdayakan adalah lebih menyorot kepada para pelaku UMKM.

7. Kemudian penulis menggunakan tulisan karya dari Sunarti E. “Kependudukan dan keluarga sejahtera: Isu strategis dalam analisis dampak kependudukan terhadap aspek sosial ekonomi”. Dalam bukunya tersebut, Sunarti E. membahas mengenai klasifikasi dan perbedaan antara keluarga Sejahtera dan keluarga prasejahtera yang diklasifikasikan melalui beberapa hal, mulai dari tempat tinggal, pendapatan suatu keluarga, hingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan primer suatu keluarga. Dalam bukunya tersebut, ia juga membahas tentang hal-hal yang berpotensi menyebabkan suatu keluarga mengalami kemunduran ekonomi hingga menjadi keluarga tergolong dalam keluarga prasejahtera. Pada tulisannya tersebut, terdapat kesamaan dengan tulisan yang ditulis oleh penulis, yakni sama-sama membahas mengenai keluarga prasejahtera. Hal yang membedakan karya dari Sunarti. E dengan penulis adalah pada tulisannya lebih berfokus pada klasifikasi dan aspek sosial ekonomi keluarga Sejahtera dan prasejahtera, sementara pada tulisan penulis juga membahas mengenai para UMKM sebagai masyarakat prasejahtera dan juga cara mengembangkan dan memberdayakannya.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Ruang Lingkup Prasejahtera

Banyak orang memaknai definisi kemiskinan sama halnya masyarakat/keluarga prasejahtera. Masyarakat prasejahtera merupakan masyarakat yang belum mampu mencukupi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.⁴ Dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, keluarga prasejahtera mengalami kesulitan untuk memenuhi hal tersebut. Banyak orang menganggap masyarakat prasejahtera sebagai suatu

⁴ Sunarti, Euis. Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya. Bogor: Badan Penerbit Institut Pertanian Bogor. Hal 4-6. 2006. Diakses pada 11 Maret 2023.

ketidakberesan suatu pembangunan sosial yang dikenali dengan suatu individu/masyarakat yang masih terjebak dalam pengangguran, ketidakberdayaan, dan keterbelakangan.

Keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya rendahnya pendapatan per bulan yang tidak sesuai dengan tingginya harga kebutuhan hidup dasar. Di mana keluarga tersebut masih sangat membutuhkan bantuan pemerintah dalam berbagai segi kehidupan, berupa bantuan pendidikan dasar maupun pelayanan kesehatan gratis. Oleh karena itu, keluarga prasejahtera sebagai masyarakat yang masih memiliki masalah dengan kesejahteraan sosialnya tentunya perlu untuk dibantu secara bersama dan harus dicari jalan keluarnya mengenai masalah yang mereka hadapi.

Pengukuran masyarakat prasejahtera dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan terendah, yang meliputi kebutuhan primer seperti makanan maupun kebutuhan primer lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kehidupan yang layak. Penentuan standar minimum diperlukan untuk membedakan antara penduduk sejahtera dan yang prasejahtera. Standar minimum BPS 1999 menyebutkan bahwa seseorang disebut miskin/prasejahtera apabila penduduk dalam pengeluaran tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara dengan 2100 kalori perhari, ditambah pemenuhan kebutuhan pokok minumum non makanan berupa tempat tinggal, pakaian, kesehatan dasar, pendidikan dasar, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya.

Biro Pusat Statistik (BPS) mengukur taraf kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan garis kemiskinan dan menghitung jumlah penduduk masyarakat miskin/prasejahtera. Garis kemiskinan tersebut dihitung dengan menggunakan data konsumsi dan data pengeluaran untuk komoditas pangan dan non pangan. Batas kecukupan pangan dihitung dengan menetapkan sebanyak 52 komoditi pangan yang

selayaknya dikonsumsi seseorang agar dapat hidup sehat yang jumlah kandungan kalornya 2100 kkal per hari.⁵

A. Indikator Prasejahtera

Salah satu indikator masyarakat prasejahtera ialah konsep garis kemiskinan Sajogyo yang menggunakan ukuran setara beras dan membedakan “*cut off point*” untuk pedesaan dan perkotaan. Konsep kemiskinan Sajogyo menyebutkan bahwa masyarakat pedesaan dikatakan miskin apabila pengeluaran berasnya setara kurang dari 320 kg per kapita dalam setahun, miskin sekali jika pengeluaran berasnya kurang dari 240 kg per kapita dalam setahun, dan paling miskin apabila pengeluaran berasnya kurang dari 180 kg per kapita dalam setahun. Sementara pada wilayah perkotaan, masing-masing kriteria tersebut memiliki tolak ukur miskin apabila pengeluaran berasnya setara kurang dari 480 kg per kapita dalam setahun, miskin sekali jika pengeluaran berasnya kurang dari 360 kg per kapita dalam setahun, dan paling miskin apabila pengeluaran berasnya kurang dari 270 kg per kapita dalam satu tahun.⁶

Indikator kemiskinan Sajogyo tersebut mendatangkan kritik dari King dan Weldon pada tahun 1974. Berdasarkan acuan dari Khomsan pada tahun 1997, indikator kemiskinan Sajogyo dipandang akan mendatangkan kesulitan karena harga beras di pasaran berfluktuasi setiap waktunya dan juga setiap daerahnya. Selain itu, kesulitan ukuran penggunaan beras adalah karena adanya program subsidi beras di Indonesia. Masih dari acuan khomsan, kritik lainnya juga disampaikan oleh Booth dan Sundrum terhadap indikator kemiskinan Sajogyo. Menurutnya, banyak masyarakat miskin yang mengandalkan sumber kalori makanan mereka bukan dari beras, tetapi melalui jagung dan ubi kayu. Harga kedua jenis makanan tersebut menurutnya meningkat lebih pesat jika

⁵ BPS. “Kemiskinan dan Ketimpangan”. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>. Diakses pada 25 Desember 2022

⁶ Sheyoputri, Aylee Ch. A. Mengenal dan Memahami Kemiskinan. Jakarta: CMB Press. Hal 28-35. 2016

dibandingkan dengan harga beras sehingga ukuran Sajogyo merupakan angka dibawah taksiran.⁷ Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2001, indikator masyarakat prasejahtera berdasarkan karakteristik rumah tangga prasejahtera pada aspek kegiatan ekonomi dapat ditinjau dari sumber penghasilannya.

Gambar 1.1
Profil Kemiskinan Indonesia Periode Maret 2019-September 2022



Sumber Gambar: Website BPS, 2023

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Maret 2019 – September 2022 di atas, jumlah kemiskinan yang melanda Indonesia pada periode September 2022 sebesar 26,36 juta orang, naik 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan turun 0,14 juta orang terhadap September 2021. Apabila dihitung berdasarkan persentase, penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, naik 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun 0,14 persen poin terhadap September 2021.

⁷ Sunarti, Euis. *Op. Cit.* Hal 4-6

Angka kemiskinan tertinggi pada periode Maret 2019 - September 2022 terjadi pada September 2020 dengan angka 27,55 juta orang (10,19%). Tingginya angka kemiskinan pada periode tersebut disebabkan karena pada masa itu sedang diberlangsungkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemic covid-19, hingga pada akhirnya memaksa para UMKM dan sektor bisnis lainnya tidak dapat beroperasi seperti biasanya.

B. Penanggulangan Masyarakat Prasejahtera

Masyarakat prasejahtera hingga saat ini masih menjadi salah satu fenomena besar yang terjadi di Indonesia. Fenomena banyaknya Masyarakat prasejahtera yang terjadi di Indonesia tentunya terjadi karena beragam faktor, mulai dari rendahnya pendidikan seseorang, jumlah lapangan kerja yang terbatas, bencana alam yang melanda suatu wilayah, dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan dari tingginya angka masyarakat prasejahtera yang terjadi di Indonesia, tentunya menghasilkan berbagai problematika, seperti meningkatkan angka kriminalitas, memunculkan konflik di masyarakat, hingga membuat angka kematian menjadi tinggi. Oleh karena itu, tentunya tingginya angka masyarakat prasejahtera yang terjadi di Indonesia hingga saat ini perlu ditekan agar tak menyebabkan berbagai problematika yang telah disebutkan di atas. Dalam upaya untuk menanggulangi masyarakat prasejahtera yang masih terjadi hingga saat ini dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan. Dengan dilakukan pemberdayaan tersebut, tentunya akan meningkatkan kualitas dari masyarakat tersebut.

1.6.2 Ruang Lingkup UMKM

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tak terlepas dengan aktivitas jual beli. Aktivitas jual beli yang kita lakukan sehari-hari pun kita lakukan dengan pelaku usaha. Usaha yang dijalankan oleh seseorang dapat kita ketahui bahwa usaha tersebut merupakan jenis UMKM dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Produk yang ada dan dijual pada usahanya dapat berubah.

2. Selain jenis barangnya yang dapat berubah, lokasinya juga sewaktu-waktu juga dapat berubah dan berpindah tempat.
3. Usaha yang dijalankan belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha belum secara terpisah.
4. Pelaku usaha/orang yang menjalankan usaha tersebut belum memiliki jiwa wirausaha yang mumpuni.
5. Pelaku usahanya biasanya juga belum memiliki akses perbankan, meskipun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank.
6. Mayoritas para pelaku usahanya juga belum memiliki surat ijin usaha atau legalitas.

Selain itu, UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 juga mengkategorikan jenis usaha yang dijalankan oleh seseorang yang termasuk ke dalam jenis usaha UMKM yang didefinisikan sebagai jenis usaha yang didirikan dan dijalankan oleh seseorang, tanpa melanjutkan atau menghubungkan dengan badan usaha yang telah ada sebelumnya.⁸

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa usaha UMKM merupakan suatu usaha yang dijalankan oleh seseorang tanpa memiliki hubungan dengan perusahaan lain dan bentuk usahanya juga belum terlalu besar dan masih memerlukan berbagai jenis bantuan, baik berupa modal yang dimiliki maupun kemampuan untuk manajemen usaha. Jenis usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM pun bervariasi, mulai dari usaha warung nasi, usaha *frozen food*, usaha warung kelontong, dan masih banyak lagi.

A. Peran dan Potensi UMKM di Indonesia

Jenis usaha UMKM memiliki peranan yang cukup vital dalam membantu pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. UMKM dapat dikatakan sebagai salah

⁸ Duwi, Kurniawan Ferry dan Luluk Fauziah. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan". JKMP. 2(2). Hal 168-169. 2014.

satu pelaku kunci proses pembangunan nasional. Pada saat terjadinya krisis moneter di Indonesia tahun 1997-1998, banyak usaha berskala besar mengalami kebangkrutan hingga terpaksa aktivitas usaha yang dijalankannya tersebut harus berhenti. Namun, hal tersebut justru tidak terjadi pada jenis usaha UMKM. Usaha UMKM pada saat itu justru lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut dan terbukti mampu bertahan hidup dan berkembang pada masa krisis yang melanda Indonesia tersebut.⁹

Saat ini UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian negara dikarenakan berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Peranan UMKM dalam membantu berkembangnya perekonomian Indonesia dapat dilihat dari keberadannya sebagai jenis usaha terbanyak ada di Indonesia, selain itu juga kontribusinya sebagai ranah dalam hal lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

⁹ Al Farisi, Salman, dkk. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. 9(1). Hal 73. 2022

Gambar 1.2
Perkembangan UMKM Tahun 2018-2019

TABEL - 1. PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB)
TAHUN 2018 - 2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2018 ^(*)		TAHUN 2019 ^(**)		PERKEMBANGAN TAHUN 2018-2019	
			JUMLAH	PANGSA [%]	JUMLAH	PANGSA [%]	JUMLAH	[%]
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	64,139,606		65,471,134		1,271,528.0	1.98
A.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	64,134,057	99.99	65,465,497	99.99	1,271,440.5	1.98
-	Usaha Mikro (UM)	(Unit)	63,350,222	98.68	64,601,352	98.67	1,251,130.5	1.97
-	Usaha Kecil (UK)	(Unit)	783,132	1.22	798,679	1.22	15,546.9	1.99
-	Usaha Menengah(UM)	(Unit)	60,702	0.09	65,405	0.10	4,703.1	7.85
B.	Usaha Besar (UB)	(Unit)	5,550	0.01	5,637	0.01	87.5	1.58
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	120,598,138		123,368,672		2,770,534.0	2.30
A.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	116,978,631	97.00	119,562,843	96.92	2,584,212.1	2.21
-	Usaha Mikro (UM)	(Orang)	107,376,540	89.04	109,842,384	89.04	2,465,843.9	2.30
-	Usaha Kecil (UK)	(Orang)	5,831,256	4.84	5,930,317	4.81	99,061.2	1.70
-	Usaha Menengah(UM)	(Orang)	3,770,835	3.13	3,790,142	3.07	19,307.0	0.51
B.	Usaha Besar (UB)	(Orang)	3,619,507	3.00	3,805,829	3.08	186,321.8	5.15
3	PDI ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	14,838,756.0		15,832,535.4		993,779.4	6.70
A.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	9,062,581.3	61.07	9,580,762.7	60.51	518,181.3	5.72
-	Usaha Mikro (UM)	(Rp. Milyar)	5,605,334.9	37.77	5,913,246.7	37.35	307,911.8	5.49
-	Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	1,422,885.1	9.60	1,508,970.1	9.53	85,085.0	5.98
-	Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	2,034,361.3	13.70	2,158,545.8	13.63	124,184.5	6.16
B.	Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	5,776,174.7	38.93	6,251,772.7	39.49	475,598.1	8.23
4	PDI ATAS DASAR HARGA KONSTAN (A+B)	(Rp. Milyar)	9,995,905.9		10,362,937.3		367,031.3	3.68
A.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	5,721,148.1	57.24	5,931,690.0	57.24	210,541.9	3.68
-	Usaha Mikro (UM)	(Rp. Milyar)	2,927,890.5	29.29	3,084,478.8	29.76	156,588.3	5.35
-	Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	1,355,705.7	13.56	1,364,268.7	13.17	8,563.0	0.63
-	Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	1,437,551.9	14.38	1,482,922.5	14.31	45,370.6	3.16
B.	Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	4,274,757.9	42.76	4,431,247.3	42.76	157,089.4	3.68

TABEL - 2. PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB)
TAHUN 2018 - 2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2018 ^(*)		TAHUN 2019 ^(**)		PERKEMBANGAN TAHUN 2018-2019	
			JUMLAH	PANGSA [%]	JUMLAH	PANGSA [%]	JUMLAH	[%]
5	TOTAL EKSPOR NON MIGAS (A+B)	(Rp. Milyar)	2,044,498.8		2,187,075.7		122,586.0	6.00
A.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	293,846.9	14.37	339,190.5	15.63	45,343.6	15.43
-	Usaha Mikro (UM)	(Rp. Milyar)	25,006.4	1.22	30,289.7	1.40	5,283.3	21.13
-	Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	47,099.7	2.30	56,407.4	2.60	9,307.7	19.76
-	Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	221,740.8	10.85	252,493.4	11.63	30,752.6	13.87
B.	Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	1,750,651.9	85.63	1,827,885.2	84.35	77,233.3	4.41
6	INVESTASI ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	4,244,885.6		4,363,362.0		118,476.4	2.79
A.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	2,564,545.5	60.42	2,619,382.0	60.03	54,836.5	2.14
-	Usaha Mikro (UM)	(Rp. Milyar)	290,849.2	6.85	294,418.5	6.75	3,569.3	1.23
-	Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	996,661.1	23.48	1,018,939.6	23.35	22,278.4	2.23
-	Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	1,277,045.2	30.09	1,305,023.9	29.93	28,978.7	2.27
B.	Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	1,680,340.1	39.58	1,743,980.0	39.97	63,749.9	3.79
7	INVESTASI ATAS DASAR HARGA KONSTAN (A+B)	(Rp. Milyar)	3,051,731.2		3,166,958.0		115,226.8	3.78
A.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	1,675,139.6	54.89	1,716,750.0	54.21	41,610.4	2.48
-	Usaha Mikro (UM)	(Rp. Milyar)	206,233.6	6.76	218,370.6	6.90	12,137.0	5.89
-	Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	522,633.9	17.13	537,086.1	16.98	15,022.2	2.88
-	Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	946,272.1	31.01	960,693.3	30.33	14,411.2	1.53
B.	Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	1,376,591.6	45.11	1,450,208.0	45.79	73,616.4	5.35

^(*) Realisasi

^(**) Angka Semesta

^(***) angka target semesta

Sumber Data: Kementerian Eksport dan Usaha Kecil dan Menengah dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Sumber Gambar: Website KemenkoPUKM, 2022

Dilihat dari data yang diterbitkan oleh website KemenkoPUKM di atas, kinerja UMKM setiap tahunnya bervariasi. Berdasarkan tabel di atas, kontribusi PDB UMKM terhadap negara mengalami penurunan dari 61,07 persen pada tahun 2018 menjadi 60,51 persen pada tahun 2019. Kondisi tersebut disebabkan karena tingkat pertumbuhan hasil dari UMKM yang cenderung tidak tetap dan masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan hasil dari jenis usaha besar.

Hal yang sama juga terjadi pada ranah unit usaha, di mana ranah tersebut adalah jenis pada usaha UMKM yang sering dijalankan oleh orang-orang, seperti pertanian dan perdagangan. Menurunnya produktivitas dalam menghasilkan produknya menjadi hambatan bagi para pelaku UMKM untuk dapat lebih mengembangkan usahanya dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya situasi di mana ketersediaan para pelaku

usaha kecil dan menengah menjadi berkurang sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga terhambat.¹⁰

Namun, meskipun kinerja dari beberapa sektor UMKM masih rendah, UMKM tetap memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis, hal tersebut dikarenakan para pelaku usaha UMKM lebih mudah menyesuaikan dengan tren dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat menjadikan UMKM sebagai sumber utama pemenuhan kehidupan sehari-harinya.¹¹ Selain itu, potensi dari UMKM dapat dilihat dari perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

B. Manajemen Kewirausahaan UMKM

1. Pola Pikir

Pola pikir dapat dipahami sebagai seluruh keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dan digunakan sebagai arahan untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, pola pikir memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, baik itu pendapat maupun sikap yang dilakukan oleh seseorang. Pola pikir yang dimiliki oleh seseorang biasanya dipengaruhi dari sifat bawaan dan lingkungan tempat tinggal orang tersebut.

Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam keluarga karyawan (bekerja dengan seseorang), cenderung beranggapan bahwa menjadi karyawan merupakan cara paling aman dan baik dalam hal mendapatkan penghasilan untuk dirinya. Namun, bagi seseorang yang tumbuh dalam keluarga pedagang, ia cenderung akan berpendapat bahwa dengan menjadi pedagang lah sebagai cara yang paling aman

¹⁰ Syarief, Faroman. Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Makassar: Penerbit Yayasan Barcode. 2020

¹¹ Syarief, Faroman. *Ibid.* Hal 87

dan baik dalam hal mendapatkan penghasilan, dan oleh karena itu ia cenderung akan berkeinginan untuk menjadi pedagang juga.

Apabila pola pikir yang dimiliki oleh seseorang dipahami sebagai hasil suatu proses belajar, maka pola pikir yang dimiliki oleh seseorang dapat dirubah, seperti halnya pola pikir menjadi pegawai/karyawan yang bekerja dengan atau untuk orang lain dapat dirubah menjadi mempekerjakan orang lain. Dengan begitu, pemahaman akan kata “seseorang dapat dikatakan berhasil jika ia telah bekerja dan mendapatkan penghasilan” dapat berubah menjadi “seseorang dapat dikatakan sukses apabila ia dapat mempekerjakan dan memberikan upah/penghasilan kepada orang lain” yang salah contohnya ialah dengan menjadi seorang wirausaha.¹²

2. Karakter Usaha

Dalam hal menjalankan usaha, setiap pelaku usaha tentunya memiliki karakteristiknya sendiri pada usaha yang dijalankannya tersebut. Namun, menurut para ahli terdapat beberapa karakteristik khusus yang mempengaruhi kemajuan usaha dimiliki yang oleh para pelaku usaha yang berjaya dalam menjalankan usahanya.

Beberapa karakteristik yang biasanya dimiliki oleh pelaku usaha yang ingin sukses dalam menjalankan usahanya adalah berorientasi pada tindakan, berorientasi pada hasil, percaya diri, antusias dan energik, berkomitmen dan menyukai hal-hal yang dilakukannya (*passion*), mampu mengerjakan banyak hal sekaligus (*multi tasker*), mampu menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas, memiliki keinginan untuk bekerja keras, mampu memotivasi diri sendiri, terampil berkomunikasi, tidak mudah menyerah, mampu memimpin dan menginspirasi orang lain, selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan diri, berani mengambil

¹² Drucker, Peter, F. Inovasi dan Kewirausahaan: Praktek dan Dasar-dasar. Jakarta: Erlangga. Hal 22. 1996

risiko, mampu mengenali dan memanfaatkan peluang, kreatif, dan inovatif. Namun dari sekian banyaknya karakteristik di atas, terdapat tiga hal yang dianggap oleh para ahli paling berpengaruh terhadap berjayanya suatu usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha, yakni kemampuan mengenali peluang, kemampuan mengambil risiko serta kreatif dan inovatif.¹³

3. Kemampuan Mengenali Peluang

Seorang pelaku usaha tentunya harus memiliki kemampuan untuk mengenali peluang usaha. Hal tersebut tentunya penting dalam proses usaha agar dapat mengembangkan dan memajukan usaha yang sedang dijalankan. Seorang pelaku usaha yang baik tidak hanya menunggu diberikan peluang oleh orang lain, namun justru mereka sendirilah yang berusaha mencari dan menjadi sumber peluang tersebut. Selain itu, suatu ide dan keinginan yang dimiliki oleh pelaku usaha mesti dipahami dan dianalisis secara mendalam agar dapat menjadi sebuah peluang/potensi yang dapat menguntungkan. Oleh karena itu, seorang pelaku usaha harus dapat memikirkan dan menemukan ide-ide dalam pengembangan usaha yang dijalankan. Suatu peluang usaha mesti dapat diciptakan lagi meskipun usaha yang sedang dijalankan telah memberikan keuntungan bagi dirinya.

Suatu peluang usaha dapat menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk dapat memenuhi keinginan konsumennya yang masih belum terpenuhi melalui identifikasi dan evaluasi yang dilakukan. Namun, mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang adalah kegiatan yang sulit dilakukan, karena suatu peluang usaha tidak akan secara tiba-tiba muncul, namun perlu dihasilkan dari kepekaan seorang pelaku usaha pada berbagai kemungkinan yang ada, atau pada kasus tertentu, merupakan hasil dari suatu eksperimen yang dilakukan untuk menemukan peluang yang potensial.

¹³ Syarief, Faroman. *Op. Cit.* Hal 55-56

Oleh karena itu, mengutip dari buku Faroman Syarief dalam tulisan Hisrich, dkk pada tahun 2010, ia mengatakan bahwa seorang pelaku usaha harus bisa mengetahui pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki, serta harus menggunakan pengetahuan dan pengalamannya tersebut ketika sedang menjalankan usaha. Hal tersebut dilakukan agar usaha yang dijalankannya dapat dikatakan berhasil.¹⁴

4. Kreativitas dan Inovasi

Semua inovasi yang dimiliki dan dijalankan oleh para pelaku usaha yang sukses dalam menjalankan usahanya, dimulai dengan ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif atau kreativitas merupakan sebuah langkah awal untuk menjadi sebuah inovasi yang akan dimiliki dan dijalankan oleh para pelaku usaha. Kreativitas adalah hal yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha dalam hal menjalankan usahanya, namun bukan merupakan kondisi yang wajib dimiliki dalam hal untuk melakukan sebuah inovasi, karena inovasi merupakan sebuah implementasi dari inspirasi kreatif.¹⁵

Kreativitas merupakan kemampuan seseorang dalam hal menciptakan suatu hal menjadi sebuah hal baru melalui keterampilan yang mereka miliki. Kreativitas dihasilkan oleh seseorang dengan cara menggabungkan dan mengubah ide yang telah mereka miliki untuk menjadi sebuah terobosan yang baru.¹⁶

Oleh karena itu, untuk menciptakan sebuah kreativitas, seorang pelaku usaha harus memiliki sikap dalam hal menerima perubahan, serta keberanian untuk mencoba ide baru yang mereka miliki, serta siap akan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, dan fleksibilitas dalam hal cara pandang segala hal. Dalam hal ini, seorang pelaku usaha perlu untuk bekerja keras dan terus-menerus

¹⁴ Syarief, Faroman. *Ibid.* Hal 58

¹⁵ Syarief, Faroman. *Ibid.* Hal 61

¹⁶ Okpara, Friday O. *The Value of Creativity and Innovation In Entrepreneurship. Journal Of Asia Entrepreneurship and Sustainability.* 3(2). Hal 2. 2007

meningkatkan ide dan solusi, serta selalu melakukan perubahan dan perbaikan terhadap sesuatu yang mereka ciptakan. Sebuah produk disebut kreatif apabila produk tersebut merupakan sebuah produk baru dan tepat. Produk yang baru merupakan produk yang belum pernah dikonsumsi oleh konsumen sebelumnya, sedangkan produk yang tepat adalah yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Mengutip dari buku Faroman Syarief dalam tulisan Hisrich, dkk pada tahun 2010 menurutnya inovasi memiliki beberapa tingkatan, tergantung pada keunikan ide-ide yang dihasilkan. Hisrich mengemukakan tiga tingkatan inovasi, diantaranya adalah *breakthrough innovation*, *technological innovation*, dan *ordinary innovation*. Inovasi *breakthrough* merupakan jenis inovasi yang paling jarang digunakan. Inovasi *breakthrough* biasanya dijadikan sebagai landasan untuk memperkuat suatu bidang yang sedang dikembangkan. Oleh karena itu, dikarenakan inovasi jenis ini menjadi landasan untuk inovasi selanjutnya, maka inovasi *breakthrough* perlu mendapatkan perlindungan khusus melalui diberikannya hak paten, rahasia perusahaan, atau hak cipta.¹⁷

Jenis inovasi yang kedua adalah inovasi *technological*, yang lebih sering muncul setelah inovasi *breakthrough*. Meskipun inovasi *technological* tidak sama dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak terlalu sering digunakan, namun tetap memiliki arti penting bagi pengembangan suatu produk atau pasar. Oleh karena itu, inovasi ini juga penting dan tetap membutuhkan perlindungan hukum.

Terakhir adalah inovasi *ordinary*. Inovasi *ordinary* merupakan jenis inovasi yang sering ditemui. Inovasi jenis ini biasanya merupakan pengembangan suatu inovasi teknologi untuk menghasilkan barang atau jasa yang lebih baik atau lebih sesuai dengan selera pasar. Inovasi *ordinary* digunakan bukan karena faktor berkembangnya teknologi, melainkan setelah analisis pasar telah selesai

¹⁷ Syarief, Faroman. *Op. Cit.* Hal 66

dilakukan. Dengan kata lain pasar memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap inovasi jenis ini dibandingkan teknologi.

C. Langkah-Langkah Mengembangkan Usaha UMKM

Saat ini banyak pelaku UMKM yang mendirikan usaha namun usahanya tidak berkembang, mengalami kerugian, dan bahkan tak jarang harus mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tentunya diperlukannya langkah – langkah dan strategi yang tepat agar usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM tersebut dapat tetap beroperasi secara optimal dan dapat menghasilkan keuntungan dari usaha yang dijalankannya tersebut. Berikut ini merupakan langkah – langkah yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM agar usaha yang dijalankan dapat lebih maju dan berkembang:

1. Mengikuti Pameran dan Festival

Dengan mengikuti acara pameran dan festival, dapat mendukung eksistensi dari produk yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Pada pameran dan festival yang diikuti oleh para pelaku usaha, di sana produk yang mereka miliki akan dikenalkan kepada masyarakat secara lebih luas. Pameran dan festival salah satu bentuk tindakan pemasaran yang cukup terjangkau dan dapat memberikan manfaat pada pelaku usaha, yang diantaranya seperti mereka dapat mengetahui endor-vendor baru, mengetahui kompetitor-kompetitor usaha, dan juga mendapatkan calon-calon pelanggan setia. Para pelaku usaha sebisa mungkin mengikuti pameran dan festival yang dirasa cocok dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankannya. Contohnya ketika pelaku usaha bergerak di bidang *fashion*, pelaku usaha dapat mengikuti pameran dan festival yang memiliki tema tentang produk *fashion* juga. Begitu pula jika pelaku usaha mempunyai usaha produk di bidang

kuliner/makanan khas, maka pelaku usaha tersebut dapat mengikuti pameran tentang makanan tradisional.¹⁸

2. Membangun Relasi antar Sesama Pelaku Usaha

Dalam menjalankan usaha ada baiknya para pelaku usaha tidak menjalankan usahanya secara sendirian, namun akan lebih baik apabila mereka memiliki relasi atau sebuah komunitas para pelaku usaha. Dengan memiliki banyak relasi, para pelaku usaha tersebut akan semakin mudah dalam hal mencari dan mendapatkan informasi mengenai vendor-vendor yang terpercaya. Selain itu, para pelaku usaha juga memiliki keuntungan dapat memperluas wilayah usahanya dengan memiliki relasi yang banyak. Oleh sebab itu, membangun relasi antar sesama pelaku usaha tentunya merupakan hal yang cukup krusial bagi para pelaku usaha.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Memastikan kualitas pelayanan yang baik merupakan bagian yang tak kalah penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam hal mengembangkan usaha yang dimiliki. pelaku usaha dapat dan harus memperbaiki kualitas pelayanannya ketika mendapatkan kritik, dan hal-hal yang kurang berkenan dari pelanggan. Dengan melakukan hal tersebut, kualitas pelayanan dari usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha akan menjadi semakin baik. Namun, tidak semua kritik, saran, dan permintaan dari pelanggan dapat dipenuhi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus paham mana kritik dan saran yang dapat membangun usaha dan mana yang bukan. Pelaku usaha mesti memprioritaskan kritik yang sering muncul pada pelanggan, karena kritik tersebutlah yang sebenarnya membuat sebagian besar pelanggan benar-benar merasa kurang nyaman. Setelah itu, pelaku usaha dapat memilih saran yang diterima dari sekian banyak pelanggan yang ada

¹⁸ Syarief, Faroman. *Ibid.* Hal 92-93

dan memperbaikinya, karena hal tersebut dapat menjadi pembeda dari kompetitor lainnya dan menjadi sebuah nilai *plus*.

4. Mengikuti Perkembangan Teknologi dalam Bisnis

Di era *modern* seperti sekarang ini, para pelaku usaha juga diharuskan mengikuti perkembangan zaman dan paham akan teknologi saat ini. Apabila pelaku UMKM tertinggal dalam hal teknologi tentu akan sangat disayangkan, karena hal tersebut dapat membantu untuk mengembangkan usaha yang dimiliki, baik dalam hal administrasi, transaksi keuangan, komunikasi, pemasaran, maupun penjualan. Para pelaku usaha tentunya mesti sering-sering mencari informasi mengenai teknologi yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan agar tidak tertinggal. Para pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi pada usaha yang dijalankan seperti ketika berkomunikasi kepada pelanggan dengan memanfaatkan aplikasi seperti *messenger*, mengirimkan video dan foto produk, *video call*, dan lain-lain.

5. Memanfaatkan Eksistensi Media Sosial

Setiap pelaku usaha tentunya berkeinginan untuk meningkatkan penjualan dalam usaha yang dijankannya. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha dan efektif adalah dengan melakukan pemasaran (*marketing*). Di zaman yang serba digital seperti sekarang ini, eksistensi internet tentunya sangat bermanfaat bagi setiap orang. Dengan adanya internet, orang-orang dapat dengan mudah menemukan informasi hanya dengan bermodalkan ponsel saja. Kebanyakan dari mereka juga menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Oleh karena itu, pemasaran secara digital merupakan suatu hal yang dapat dan perlu dilakukan oleh para pelaku usaha untuk dapat memperkenalkan produk yang mereka miliki kepada calon masyarakat luas. Dengan seringnya mereka membuka media sosial semakin besar mereka bisa melihat produk pelaku UMKM. Oleh karena itu, para pelaku usaha dirasa perlu memanfaatkan internet sebagai

sarana untuk melakukan pemasaran digital dengan menggunakan beberapa *platform* media sosial yang sering dikunjungi orang banyak, seperti facebook, instagram, line, whatsapp, dan BBM, dan lain-lain.

6. Menggunakan *E-commerce* Sebagai Sarana Menjual Produk

Era digital seperti sekarang ini memudahkan orang-orang dan membuat orang lebih memilih berbelanja dengan menggunakan internet alias belanja *online*. Hal tersebut dikarenakan belanja *online* dirasa lebih fleksibel, dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun. Dengan berbelanja secara *online*, pelanggan tidak perlu pergi ke mall ataupun ke tempat perbelanjaan untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Selain itu, transaksi yang dilakukan dengan belanja *online* lebih beragam dan memudahkan orang-orang. Salah satu cara orang-orang untuk berbelanja online adalah dengan mengakses *e-commerce*. *E-commerce* merupakan sebuah situs dimana orang dapat melakukan jual beli segala jenis barang dan semuanya dilakukan menggunakan internet atau secara online. *E-commerce* dengan konsep *marketplace* menawarkan jasa bagi pengusaha untuk menjual secara online dengan cara membuka toko di situs mereka. Para pelaku usaha dapat menggunakan beberapa situs *e-commerce* untuk menjual produk dan memperluas area pasar target yang dimiliki.¹⁹

1.6.3 Ruang Lingkup Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu gerakan yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang yang esensinya untuk menaikkan derajat seseorang dan masyarakat lainnya yang sedang dalam keadaan tidak mampu agar masyarakat tersebut dapat terbebas dari jeratan ketidakberdayaan dan kesulitan untuk memenuhi

¹⁹ Adminkoperasi. 2017. 8 Cara Jitu Mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Tersedia di: <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/558/8-cara-jitu-mengembangkan-umkm-usaha-mikro-kecil-menengah>. Diakses pada: 15 Maret 2023

kebutuhan hidupnya.²⁰ Secara etimologis pemberdayaan terlahir dari kata dasar daya, yang memiliki makna kekuatan atau *power*. Oleh karena itu, pemberdayaan dimengerti sebagai metode untuk mendapatkan kekuatan atau *power* dari pihak yang telah memiliki kekuatan kepada pihak yang kurang atau belum memiliki kekuatan.²¹

Menurut Chambers, Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah skema pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial di dalamnya dan dalam skema tersebut merefleksikan sebuah model baru yang menggambarkan pembangunan yang sifatnya berpusat pada masyarakat, partisipatif, *empowering*, dan *sustainable*. Skema mengenai pemberdayaan merupakan suatu skema yang tidak hanya didefinisikan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dari seseorang atau menghindari seseorang dari perangkap kemiskinan, namun skema mengenai pemberdayaan mengenai definisi yang lebih luas daripada hal tersebut. Sedangkan menurut Jim Ife, skema mengenai pemberdayaan mempunyai relasi yang sangat kuat antara dua kata penting, yakni *power* (daya) dan *disadvantaged* (ketimpangan).²²

Pemahaman lainnya mengenai pemberdayaan didefinisikan sebagai mekanisme mengembangkan kemampuan seseorang agar mereka dapat mengetahui kemampuan mereka yang mereka miliki dapat menjadi semakin baik dan dapat berdampak pada masyarakat disekitar mereka menjadi semakin baik pada suatu hari. Contohnya adalah peningkatan pemahaman, proses penentuan keputusan, dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.²³ Menurut pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pemberdayaan ialah prosedur mengajak seseorang agar mereka ikut menjalankan sebuah hal yang belum pernah mereka kerjakan, khususnya orang-orang yang belum sama sekali menggali kemampuannya untuk mengembangkan taraf kehidupan mereka melalui

²⁰ Zubaedi. *Op. Cit.* Hal 21

²¹ Sulistiyani. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Grafindo. Hal 13. 2004

²² Zubaedi. *Loc. Cit.* Hal 21

²³ Hegeman-Davis, Raya G. *Conceptualizing Empowerment in International Development Education*. (Doctor of Dissertation, University of Minnesota). Hal 104. 2013

pengembangan potensi yang dimiliki, dan juga memaksimalkan apapun yang ada di sekitar mereka sebijak mungkin demi memperoleh kehidupan yang meningkat.

Berdasarkan pernyataan para tokoh-tokoh tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan ialah suatu cara yang dilakukan agar dapat meningkatkan harkat dan martabat guna meningkatkan kehidupan seseorang maupun masyarakat yang tengah berada dalam keadaan ketidakmampuan, sehingga seseorang atau masyarakat tersebut bisa terbebas dari jeratan ketidakmampuan yang mereka alami. Pemberdayaan merupakan suatu cara untuk mendirikan dan menambah kecakapan seseorang maupun masyarakat dengan memberikan dorongan moral, memberikan motivasi, maupun menyadarkan seseorang tersebut mengenai potensi yang ia miliki untuk dapat dikembangkan hingga mencapai sebuah hasil yang positif untuk dirinya.²⁴

A. Tujuan Pemberdayaan

Partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan pada hakikatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan proses awal untuk membuat masyarakat dapat memperbaiki kehidupan mereka. Dalam hal memberikan kesempatan dan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, pemerintah daerah tentunya berperan penting untuk menginisiasi, merencanakan, dan mendukung secara bersama kegiatan/program apa yang dapat dijadikan peluang selain selain pengembangan sumber daya manusia yang menjadi sasaran utama kegiatan/program tersebut.²⁵

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lapisan masyarakat yang masih dalam kondisi ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan, dan kesulitan untuk membangun sumber daya manusianya, pemberdayaan menjadi

²⁴ Pailaya, Eddy Ch. Wacana Pembangunan Alternative. Yogyakarta: Sr-Ruzz Madia. Hal 33. 2001

²⁵ Teja, Mohamad. "Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir". Aspirasi. 6(1). Hal 65. 2015

sebuah alternatif dan solusi dari kebijakan pemerintah pusat atau daerah dalam hal memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perbaikan kehidupan masyarakat.

Fokus kegiatan pengembangan masyarakat ialah dengan meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat prasejahtera. Dari yang kita ketahui, masyarakat prasejahtera/miskin merupakan suatu *problem* yang harus segera diatasi. Kemiskinan/prasejahtera adalah suatu hal yang setiap kali dibicarakan selalu meninggalkan suatu kekhawatiran. Hal tersebut dikarenakan fenomenan tersebut merupakan fenomenan yang selalu ingin diselesaikan namun hingga saat ini masih tak kunjung berhasil.

Amartya Sen, seorang ekonom sekaligus filsuf yang berasal dari India memberikan pandangannya mengenai kemiskinan. Dikutip dari buku *Development as Freedom and Poverty and Famines*, menurutnya kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang atau masyarakat memiliki akses yang sangat kecil, bahkan tidak sama sekali dalam hal mendapatkan Kesehatan, pendidikan, informasi, sandang, pangan, dan papan.²⁶

Dengan kata lain, tujuan dilakukannya pemberdayaan masyarakat tentunya ialah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi merdeka. Kemerdekaan yang dimaksud mencakup memiliki kemerdekaan dalam berpikir, kemerdekaan dalam bertindak, dan kemandirian untuk mengontrol hal-hal yang dilakukan oleh individu dan masyarakat tersebut.²⁷ Merdekanya masyarakat dapat dilihat dari apakah masyarakat tersebut mampu memilih dan mengerjakan suatu hal yang dianggap benar dan menemukan jalan keluar dari problematika yang mereka miliki melalui kemampuan berfikir, sikap dan perilaku, serta kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki.

²⁶ Zubaedi. *Op. Cit.* Hal 77

²⁷ Sulistiyani, Ambar Teguh. "Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan". Gava Medika;Yogyakarta. Hal 48. 2004

B. Tahapan Pemberdayaan

Terkait dengan pentingnya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, tentunya hal tersebut harus dilakukan secara terencana. Apabila hal tersebut dilakukan secara matang, maka hasilnya sudah dapat dipastikan akan memberikan kepuasan terhadap masyarakat dalam proses perubahan tersebut. Pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berupaya untuk memutuskan tujuan masa depan mereka sendiri sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Oleh karena itu, mereka lah yang mengolah apa saja yang menjadi kebutuhan mereka sendiri dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

Adapun beberapa tahapan yang harus dilakukan agar proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara optimal diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Persiapan

Pada tahap ini, petugas Bersiap dengan tujuan atau pemberdayaan yang hendak dilakukan agar mencapai kesepakatan antara anggota dengan *agent of change* mengenai metode yang menurut mereka cocok untuk digunakan dalam kegiatan pemberdayaan yang akan dijalankan.

2. *Assesment*

Tahap ini merupakan tahap pengenalan dan analisa terhadap *problem* dan hal-hal apa saja yang dimiliki oleh masyarakat. Pada tahap *assessment* ini biasanya suatu kegiatan pemberdayaannya melakukannya dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan yang dialami oleh masyarakat yang akan diberdayakan.

3. Perencanaan Program

Pada tahap ini *agent of change* mengajak masyarakat prasejahtera tersebut untuk mengetahui *problem* yang mereka miliki, sekaligus mencoba untuk

menemukan cara agar masyarakat prasejahtera tersebut dapat terbebas dari masalah yang mereka alami.

4. Formulasi Aksi

Dalam tahap ini *agent of change* mencoba membantu masyarakat prasejahtera tersebut untuk menentukan program dan kegiatan apa yang sekiranya sesuai dan mampu diikuti dengan baik oleh mereka dan akan dijalankan dalam kegiatan pemberdayaan nantinya. Dalam tahap ini, oleh fasilitatorlah yang berperan memformulasikan rencana dan aksi yang akan mereka jalankan kepada masyarakat.

5. Pelaksanaan Program/kegiatan.

Tahap ini merupakan kegiatan utama yang telah dipersiapkan tahapan-tahapan sebelumnya dan di sini *agent of change* memberdayakan para anggota yang mengikuti program pemberdayaan melalui pemamparan dan edukasi yang diberikan.

6. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahap di mana program-program yang telah dilakukan diperhatikan secara detail oleh *agent of change* dan peserta program pemberdayaan mengenai kelebihan maupun kekurangan yang terjadi dalam program tersebut.²⁸

C. Tahapan Pemberdayaan

Dalam tahapan pemberdayaan, masyarakat dituntun dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia untuk menciptakan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam tahapan pemberdayaan dibutuhkan

²⁸ Ali, Sukma Napis. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prasejahtera Melalui Bimbingan Marketing Online oleh Yayasan Insan Mulia Sejahtera di Pasar Minggu Jakarta Selatan. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). 2021. Diakses pada 9 Maret 2023.

beberapa step guna mencapai hasil yang maksimal. Adapun contoh dari step-step yang perlu dilakukan selama pemberdayaan masyarakat diantaranya ialah penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan.

Penyuluhan sering kali disamakan dengan kegiatan sosialisasi, karena kedua kegiatan tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menimbulkan rasa kepekaan dan pengetahuan mengenai kegiatan pemberdayaan yang hendak digulirkan. Oleh karena itu, penyuluhan dan sosialisasi memiliki cara yang serupa dalam hal pengerjaannya. Oleh karena itu, metode pengembangan minat atau *Achievement Monitoring Training (AMT)* secara intens diberlakukan guna meningkatkan rasa kepekaan masyarakat akan bermaknanya transformasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kesuksesan cara-cara perubahan yang hendak dijalankan lewat pembangunan berdasarkan masyarakat.²⁹

Sedangkan pelatihan ialah elemen dari pembelajaran yang mempresentasikan tahapan dari peningkata individu, Masyarakat, komunitas, dan organisasi. Moekijat memandang pelatihan sebaagai sebuah fragmen pendidikan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk mendapatkan dan menumbuhkan kemampuan tanpa melibatkan pola pendidikan yang ada, dalam waktu yang tidak panjang, dan step-stepnya cenderung memprioritaskan praktik dibandingkan dengan teori.³⁰

Selain melakukan penyuluhan dan pelatihan, dalam upaya untuk mengembangkan masyarakat tentunya juga perlu dilakukannya proses pendampingan. Pendampingan dapat diamini sebagai aktivitas dengan tujuan untuk membaerdayakan Masyarakat yang menyertai fasilitator, komunikator, dinamisator, atau motivator. Secara pokok, pendampingan ialah sebuah cara untuk mengaitkan

²⁹ Theresia, Aprilia. *Pembangunan Berbasis masyarakat : Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung. Alfabeta. 2014. Hal 236

³⁰ Moekijat. (2002). *Dasar-dasar Motivasi*. Bandung: Pionir Jaya.

massyarakat agar dapat meningkatkan keterampilan yang mereka miliki guna memiliki kehidupan yang semakin baik.³¹

1.6.4 Teori ACTORS Sarah Cook dan Steve Macaulay

Menurut para ahli, teori mengenai pemberdayaan masyarakat hingga saat ini terus berkembang yang ditandai dengan munculnya teori-teori baru tentang pemberdayaan masyarakat. Namun, terdapat salah satu teori pemberdayaan masyarakat menurut ahli ilmu sosial yang menjadi ciri khas dan sering digunakan sebagai pisau analisis mengenai pemberdayaan, yakni teori ACTORS dari Sarah Cook dan Steve Macaulay.

Pada pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat kali ini penulis tertarik menggunakan teori ACTORS dari Sarah Cook dan Steve Macaulay. Hal tersebut dilandasi dikarenakan berdasarkan indikator keberhasilan suatu proses pemberdayaan masyarakat yakni program pemberdayaan masyarakat bisa dibilang sukses jika masyarakat secara sadar dan berdasarkan keinginan dari diri mereka sendiri untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan program tersebut. Oleh karena itu penulis meyakini adanya keterkaitan antara teori ACTORS dengan indikator keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh program Daya.

Teori yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay ini menghasilkan perubahan terencana pada masyarakat karena *input* yang digunakan sudah diantisipasi sebelumnya. Oleh sebab itu, hasil yang akan didapatkan setelah dilakukannya pemberdayaan, dapat menghasilkan hasil yang optimal. Dalam kerangka kerja teori Actors, pemberdayaan dilakukan dengan menumbuhkan keberdayaan masyarakat yang didukung oleh aspek internal dan eksternal, sedangkan pelaku

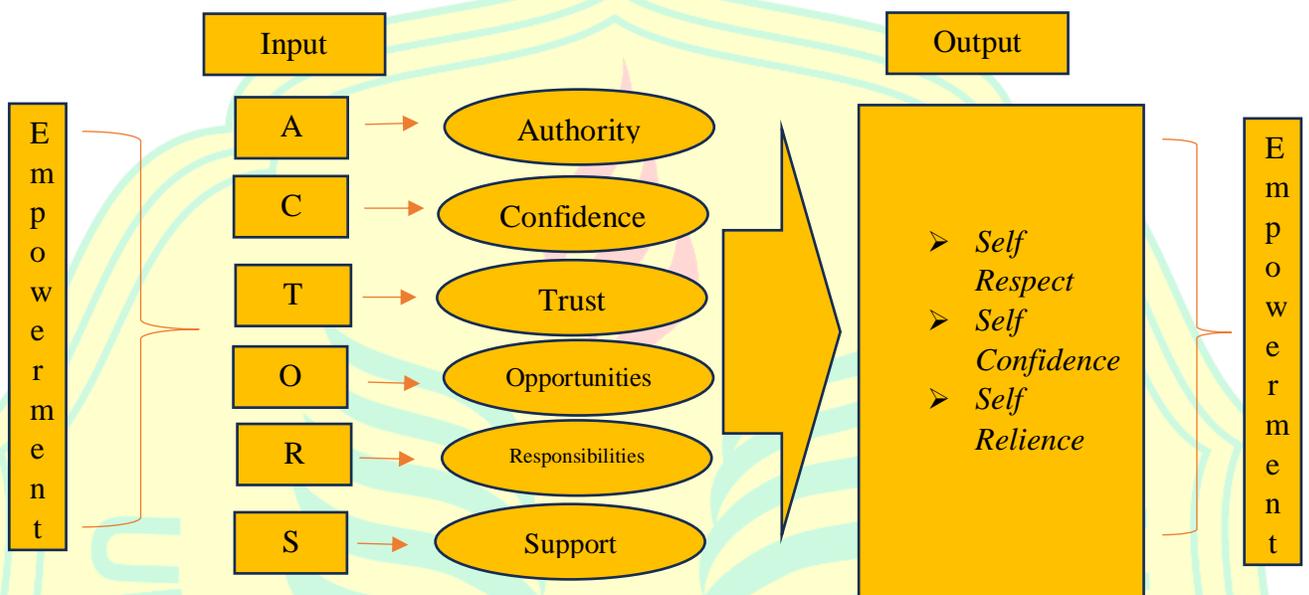
³¹ Adriyani, Ria, dkk. "Pendampingan Kelompok Usaha Kerupuk Rajungan Sebagai Upaya Pemberrdayaan Masyarakat di Kawasan Pesisir Pantai Utara Cirebon". *Dimasejati*. 2(1). 2020. Hal 103

pemberdayaan dalam teori ACTORS adalah pemerintah atau organisasi non pemerintah.

Teori ACTORS tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay melihat masyarakat sebagai subyek yang dapat menciptakan perubahan, namun dengan cara memberikan kewenangan dan kesempatan kepada orang tersebut untuk dapat mencoba dan mempertanggungjawabkan setiap ide, gagasan, maupun tindakan yang mereka pilih dan mereka lakukan, tanpa mengontrol orang tersebut dengan aturan-aturan yang ketat. Pemberdayaan yang diamini oleh teori ACTORS menyorot pada ranah sosial dan cara berfikir seseorang, yang diantaranya ialah dengan memotivasi kesabaran seseorang, memberikan wewenang, mengatur kinerja, memajukan suatu komunitas, mengajak kerjasama, melakukan komunikasi secara efektif, memecut adanya pembaharuan, dan mengatasi setiap masalah yang dialami oleh Masyarakat yang tidak berdaya tersebut.³²

³² Sarah Cook & Steve Macaulay. Perfect Empewermant. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 1997. Hal 38

Skema 1.1
Kerangka Kerja Teori Actors



Sumber: Diolah dari Buku Sarah Cook dan Steve Macaulay, 1997

Kerangka kerja pemberdayaan pada teori ACTORS dapat dilihat dari kata “ACTORS” yang memiliki arti atau maksud dengan terdiri dari beberapa huruf yang antara lain terdiri dari:

1. (A) *Authority*, pada poin ini setiap individu atau masyarakat dikasih wewenang untuk mengubah sikap dan semangat untuk menjadi diri mereka sendiri.
2. (C) *Confidence and Competence*, pada poin ini fasilitator memastikan agar individu atau masyarakat memiliki rasa percaya diri melalui dilihatnya potensi yang dimiliki oleh individu atau masyarakat tersebut guna tercapainya perubahan.
3. (T) *Trust*, memberikan keyakinan pada pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang akan menjadi milik mereka sendiri (bagaimana

mengubah diri sendiri dan orang lain melalui keyakinan atas potensi diri sendiri).

4. (O) *Oppurtunities*, pada poin ini fasilitator membebaskan individu atau masyarakat untuk menentukan hal atau cara apa yang memang mereka inginkan dengan tujuan agar mereka dapat berkemabang sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
5. (R) *Responsibilities*, bertanggungjawab selama melakukan pemberdayaan dengan cara melakukan pengelolaan yang tepat sehingga masyarakat dapat berubah menjadi lebih baik.
6. (S) *Support*, diberikannya dukungan dari berbagai pihak untuk menunjang pemberdayaan yang dilakukan agar masyarakat memiliki kehidupan yang lebih unggul dari kehidupan mereka sebelumnya. Selain dalam hal materiil, dukungan yang dimaksud di sini juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, seperti peran pihak swasta maupun pemerintah secara beriringan dan berbarengan.³³

1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan kali ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang merupakan penelitian diawali melalui pencarian data secara detail dan terorganisir oleh suatu fenomena permasalahan yang terdapat di masyarakat dan diuraikan secara lengkap dan nyata sesuai dengan hasil temuan yang ditemukan. Menurut Neuman, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memaparkan suatu fenomena dengan mempercayakan prinsip-prinsip ilmu sosial

³³ Ayu, Sekarrini Pramadita dan Heru Siswanto. "Peran Komunitas Pecinta Hidroponik Surabaya (PHS) Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Hidroponik di Pojok Kebun Gemah Ripah Surabaya". *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*. 9(1). 2020. Hal 6-7

interpretatif atau kritis. Studi kualitatif membahas permasalahan dan konteks serta makna budaya dari fenomena yang akan dikaji.³⁴

Secara singkat, metode kualitatif merupakan metode yang mengupayakan pemahaman makna dari peristiwa yang ada dengan mengaitkan perilaku manusia dalam situasi tertentu menurut pandangan peneliti. Oleh karena itu, metode kualitatif dipakai untuk meneliti sebuah fenomena yang berkaitan langsung pada manusia secara individu. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk melihat fenomena yang terjadi di lapangan kemudian dijelaskan secara sistematis.

Pada penelitian kualitatif menggunakan istilah kata informan yang merupakan orang yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas pada penelitian yang dilakukan. Informan didefinisikan sebagai seseorang yang menjadi sumber informasi utamadalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti meraih informasi yang dibutuhkan melalui wawancara langsung bersama dengan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria kebutuhan penelitian.

Menurut Djam'an dan Aan Komariah menjelaskan informan pada penelitian kualitatif dipilih dan ditemukan oleh peneliti (*purposive*).³⁵ Sedangkan Augusty mendefinisikan *Purposive* sebagai penentuan sampel dimana peneliti memilih sampel secara subjektif (sengaja). Pemilihan sampel ini dilakukan sebab peneliti telah memahami bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari satu kelompok

³⁴ Neuman W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (Seventh Edition)*. Pearson Education: USA. 2014. Hal 167

³⁵ Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Kedua)*. Bandung: Alfabeta. 2010. Hal 50

sasaran tertentu yang mampu memberikan informasi yang dikehendaki karena mereka memang memiliki informasi yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti.³⁶

Oleh karena itu, peneliti memakai metode kualitatif dikarenakan dalam penelitian yang dilakukan memerlukan komprehensif dari narasumber atau informan agar penulis dapat memaparkan penelitian yang dilakukan mengenai peran dari suatu bank umum syariah dalam hal memberdayakan masyarakat prasejahtera yang merupakan nasabahnya.

1.8 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah sebuah bagian yang sangat fundamental pada saat melakukan sebuah penelitian. Subjek penelitian merupakan narasumber atau sumber data dan informasi peneliti perlukan agar dapat mengetahui permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Informan atau narasumber adalah orang yang mengetahui dan bersedia memberikan informasi mengenai data yang diburuhkan oleh peneliti yang pastinya sesuai dengan permasalahan pada penelitian yang dilakukan.³⁷

Peneliti menentukan beberapa narasumber atau informan yang terdiri dari beberapa informan kunci yang terdiri dari beberapa nasabah BTPN Syariah yang merupakan 5 masyarakat prasejahtera sebagai pelaku UMKM, 2 mahasiswa yang berperan sebagai fasilitator pendamping kepada nasabah BTPN Syariah, dan dan staff dari program Daya BTPN Syariah sebagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program Daya.

³⁶ Ferdinand, Augusty. Metodologi Penelitian Manajemen. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2006. Hal 55

³⁷ Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial, Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 2009. Hal 91

Tabel 1.1
Karakteristik Informan

No	Kategori Informan	Nama	Usia	Pekerjaan	Lokasi Penelitian	Peran
1	Pelaku UMKM	Mumminatul Affiah	46 Tahun	Pelaku UMKM	Jl. Jeren, Jatiluhur, Jatiasih, Kota Bekasi (Rumah Informan)	Merupakan informan kunci dan sebagai fokus kajian pada penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat
2	Pelaku UMKM	Yayah Hoyriah	38 Tahun	Pelaku UMKM	Perum. Asabri Indah, Jatiluhur, Jatiasih, Kota Bekasi (Rumah Informan)	Merupakan informan kunci dan sebagai fokus kajian pada penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat
3	Pelaku UMKM dan	Hendra	38 Tahun	Pelaku UMKM	Perum. Asabri Indah, Jatiluhur, Jatiasih, Kota Bekasi (Rumah Informan)	Merupakan informan kunci dan sebagai fokus kajian pada penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat
4	Pelaku UMKM	Roni	49 Tahun	Pelaku UMKM	Jl. Pulo Utama, Pedurenan, Mustika	Merupakan informan kunci dan sebagai fokus kajian pada penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat

					Jaya, Kota Bekasi (Rumah Informan)	
5	Pelaku UMKM	Bonih	45 Tahun	Pelaku UMKM	Jl. Matador, Jatirangga, Jatisampurna, Kota Bekasi (Rumah Informan)	Merupakan informan kunci dan sebagai fokus kajian pada penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat
6	Fasilitator Pendamping	Muhammad Bintang	21 Tahun	Mahasiswa	Jl. Cikajang, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Kopikalyan Cikajang)	Merupakan informan kunci pada penelitian mengenai peran mahasiswa sebagai fasilitator pada program pemberdayaan yang dilakukan
7	Fasilitator Pendamping	Sarah Hussaini	21 Tahun	Mahasiswa	Jl. Boulevard BCBD, Marga Mulya, Kota Bekasi (Kopi Nako Summarecon Bekasi)	Merupakan informan kunci pada penelitian mengenai peran mahasiswa sebagai fasilitator pada program pemberdayaan yang dilakukan
8	Penyelenggara Program Daya	Koekoeh	48 Tahun	Staff Divisi Daya Bank BTPN Syariah	CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, Kota Jakarta Selatan (Menara BTPN)	Merupakan sumber informasi untuk mengetahui program Daya dan karakteristik peserta program Daya

Sumber: Analisis Penulis, 2023

1.9 Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut Sukmadinata, dalam hal menentukan lokasi penelitian sesuai dengan bagian, kelompok, atau orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan atau hal yang hendak diteliti.³⁸ Lokasi pada penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, seperti kantor pusat BTPN Syariah yang terletak di Jakarta, rumah para pelaku UMKM di beberapa wilayah di Bekasi, dan 2 kedai kopi di daerah Bekasi dan Jakarta. Penelitian dilakukan mulai dari 22 Desember 2022 hingga 17 Juni 2023.

1.10 Peran Peneliti

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti berperan sebagai pelaku dari penelitian. Peneliti berusaha mencari informasi mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat prasejahtera yang dilakukan oleh Bank BTPN Syariah. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan turun langsung ke tempat penelitian agar memperoleh data yang diperlukan secara detail dan mendalam sehingga peneliti dapat memahami secara detail bagaimana peran Program Daya yang merupakan program dari Bank BTPN Syariah dalam hal memberdayakan nasabah-nasabah dari bank BTPN Syariah yang merupakan masyarakat prasejahtera, serta perkembangan dari usaha para nasabah Bank BTPN Syariah setelah mendapatkan edukasi dari para mahasiswa yang berperan sebagai fasilitator pendamping. Selain itu peneliti berperan sebagai merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis data sehingga menghasilkan suatu temuan penelitian.

1.11 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penulisan penelitian ini melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Berikut ini akan dijabarkan pengumpulan data yang dipakai untuk menulis laporan penelitian ini:

³⁸ Rukajat, Ajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif (Edisi Pertama). Yogyakarta: deepublish. 2018. Hal 73

1.11.1 Observasi

Dalam upaya memperoleh data pada penelitian yang dilakukan, peneliti harus melakukan studi lapangan. Hal ini sangat perlu untuk dilakukan agar dapat secara langsung dan detail mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Observasi yang dilakukan memiliki tujuan agar peneliti mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan oleh panca indra baik penciuman, pendengaran, penglihatan, peraba dan pengecapan terhadap objek secara langsung. Observasi dilakukan sebanyak 3 kali pada rumah dan tempat usaha pelaku UMKM, yakni sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, dan beberapa hari setelah melakukan wawancara dengan para pelaku UMKM. Pengumpulan data melalui observasi dirasa cukup penting untuk mengamati narasumber atau informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dibahas.

1.11.2 Wawancara

Wawancara mendalam kepada informan juga merupakan teknik yang diperlukan dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti Teknik wawancara dilakukan untuk penghimpunan data primer penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan 8 orang, yang terdiri dari 5 orang pelaku UMKM, 2 orang mahasiswa dan 1 orang penyelenggara program Daya, sesuai dengan keperluan peneliti agar dapat ditemukannya informasi. Dengan melakukan wawancara, peneliti bisa memperoleh informasi yang lebih banyak dan detail. Oleh karena itu, teknik wawancara dalam penelitian ini merupakan Teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam hal untuk mengetahui strategi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat prasejahtera yang dilakukan oleh program Daya.

1.11.3 Studi Pustaka dan Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mencari bahan-bahan referensi melalui studi sebelumnya yang terdiri dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun buku yang memiliki kaitan

dengan penelitian yang diteliti. Studi Pustaka dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai topik penelitian. Sedangkan pengumpulan data melalui dokumentasi adalah pengumpulan data yang didapatkan melalui foto. Dokumentasi diperlukan untuk memperlihatkan subjek atau objek yang ada di lapangan ini dilakukan untuk menjadi data pendukung.

1.12 Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini terbagi dalam tiga kategori sederhana, yakni Pendahuluan, Isi, dan Penutup. Ketiga kategori tersebut dituangkan dalam lima bab yang meliputi satu bab Pendahuluan, tiga bab Pembahasan atau temuan, dan satu bab Penutup atau kesimpulan. Pembagian kedalam tiga kategori dan lima bab tersebut dilakuka dengan tujuan memudahkan para pembaca.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian awal penulisan skripsi ini peneliti sekaligus penulis menguraikan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, teknik-teknik, dan metode yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini. Pada bagian awal penulisan skripsi ini penulis juga menggunakan dan memaparkan kerangka konsep yang pada bahasanya sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Bagian ini juga mencakup informasi-informasi yang diantaranya seperti lokasi penelitian, waktu penelitian, dan subjek yang dijadikan topik utama dalam penelitian yang dilakukan.

BAB II GAMBARAN UMUM BTPN SYARIAH DAN PROGRAM DAYA

Pada bab ini peneliti membahas gambaran umum mengenai Bank BTPN Syariah yang menjadi subjek utama penelitian. Gambaran umum yang dibahas pada bab ini mengenai sejarah terbentuknya bank tersebut, lokasi dan program Daya sebagai program yang dirancang oleh BTPN Syariah sebagai program untuk pengembangan dan pemberdayaan nasabahnya yang merupakan masyarakat prasejahtera. Pada pemaparan di bab ini tak ketinggalan dipaparkan juga karakteristik informan yang

ditetapkan oleh peneliti sendiri sebagai informan agar dapat memberikan gambaran yang jelas kepada para pembaca.

BAB III PERAN BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT

Dalam bab ini peneliti berupaya untuk memaparkan dan mendeskripsikan hasil temuan yang berupa peran dan respon dari Bank BTPN Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia dalam hal melihat masih banyaknya masyarakat di Indonesia yang belum mampu atau belum mendapatkan kesempatan menggunakan sektor keuangan formal, terutama para pelaku UMKM. Selain belum mengakses sektor keuangan formal, mereka juga masih cukup kesulitan untuk menjalankan atau mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, Bank BTPN Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan mencoba untuk membantu para pelaku UMKM tersebut dengan memberikan dana pinjaman usaha, serta memberikan edukasi mengenai pengembangan usaha.

BAB IV BENTUK KEGIATAN PEMBERDAYAAN DALAM PROGRAM DAYA BTPN SYARIAH

Pada bab ini peneliti mencoba menganalisis antara temuan yang ditemukan ketika melakukan penelitian dengan konsep-konsep yang telah dibahas pada bab satu. Konsep-konsep tersebut dihubungkan dengan hasil temuan penelitian sehingga membantu mencapai keakuratan dan kevalidan penelitian. Pada penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan konsep prasejahtera, pemberdayaan, dan pelaku UMKM. Dimana para pelaku UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, para pelaku UMKM tersebut perlu diberdayakan agar selain dapat mengubah taraf kehidupannya sendiri, para pelaku UMKM tersebut juga dapat berkontribusi pada negara melalui usaha yang dijalankannya. Hal tersebutlah yang coba dilakukan oleh program Daya dengan melakukann kegiatan pemberdayaan kepada pelaku UMKM. Pemberdayaan yang

dilakukan oleh program Daya kepada para pelaku UMKM juga dianalisis dan dikaitkan dengan teori pemberdayaan menurut teori ACTORS dari Sarah Cook dan Steve Macaulay yang hendak dibahas pada bab ini.

BAB V PENUTUP

Pada bagian terakhir penulisan pada skripsi ini merupakan bagian penutup. Dalam bab ini peneliti membuat kesimpulan dari segala proses penelitian yang dilakukan. Kesimpulan yang dituliskan adalah bentuk sederhana dari jawaban-jawaban yang ditemukan selama penelitian. Selain itu, peneliti juga memformulasikan beberapa saran untuk setiap pihak yang terdapat pada isi penulis dalam skripsi ini.

